

4

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yuniarti Reny Renggo
Universitas Kristen Wira Wacana Sumba
(Naskah diterima: 1 Juni 2019, disetujui: 28 Juli 2019)

Abstract

This study aims to analyze the effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) in improving regional development seen from two indicators, namely economic indicators (Economic Growth) and social indicators (Human Development Index or HDI). The analytical tool used in this study is Panel Data Regression Analysis from 2013 to 2016 at 21 municipal districts in East Nusa Tenggara Province. Viewed from the Economic Growth, the study showed that PAD, DAU and DAK have significant impact on regional development. However, from the social indicators perspective, the Human Development Index is only influenced by PAD and DAK, in which PAD decreases HDI; and DAK increases the HDI.

Keywords: *(Regional Original Income, Economic Growth, Human Development Index)*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan pembangunan daerah dilihat dari dua indikator yaitu indikator ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi) dan indikator sosial (*Human Development Index*). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Data Panel dari tahun 2013 hingga tahun 2016 untuk 21 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini adalah PAD, DAU dan DAK signifikan berpengaruh meningkatkan pembangunan daerah dari indikator ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Namun dari indikator sosial yaitu *Human Development Index* hanya dipengaruhi oleh PAD dan DAK, dimana PAD berpengaruh menurunkan IPM dan DAK berpengaruh meningkatkan IPM.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia

I. PENDAHULUAN

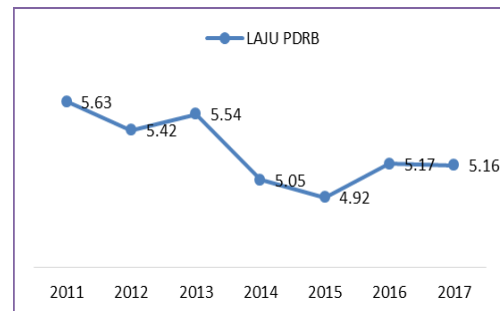
Pembangunan merupakan salah satu upaya untuk menuju kepada proses yang lebih baik, di berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik (Baety, 2013). Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Rori et al., 2016). Proses pembangunan menghendaki perubahan pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan pada dua hal yaitu struktur ekonomi dari pertanian ke industri dan perubahan kelembagaan (Kuncoro, 2010). Pertumbuhan ekonomi menurut Budiono (dalam Dewi, 2013) adalah peningkatan output yang dihasilkan oleh masyarakat karena semakin banyak faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi. PDB atas dasar harga konstan akan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

UU No 32 tahun 2004, dimana setiap daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat (Uhis, 2013), menjadi suatu tumpuan bagi provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan Pembangunan Ekonomi. Salah satu indikator pembangunan adalah indikator ekonomi

yang termasuk di dalamnya adalah GNP per kapita laju pertumbuhan ekonomi dan GDP per kapita dengan *Purchasing Power Parity* (Kuncoro, 2010). Berikut pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 2011 – 2017 yang tercermin dari PDRB atas dasar harga konstan.

II. KAJIAN TEORI

Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam %)

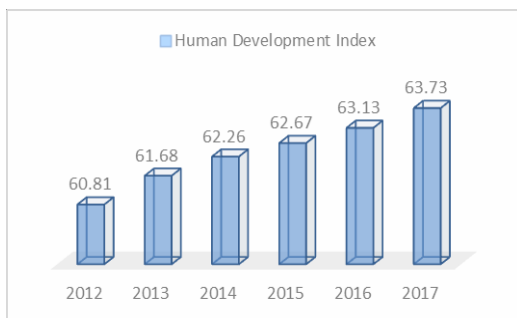


Sumber: olah BPS (NTT dalam angka 2014 – 2018)

Gambar 1 menunjukkan laju pertumbuhan yang mengalami fluktuasi dari tahun ketahun dan cenderung fluktuasinya menurun, pada tahun 2011 laju pertumbuhan sebesar 5.63 % mengalami fluktuasi yang menurun hingga 5.16 % pada tahun 2017. Selain indikator ekonomi, salah satu indikator lainnya adalah indikator sosial yang termasuk di dalamnya adalah Indeks pembangunan manusia dan Indeks Mutu Hidup (Kuncoro, 2010). IPM merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk

melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia, agar mampu membawa keberhasilan pada pembangunan suatu daerah (Baety, 2013). Selain itu juga, IPM bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia antarnegara maupun antar daerah (Kuncoro, 2010).

Gambar 2. *Human Development Index* Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 – 2017



Sumber: olah BPS (NTT dalam angka 2014 – 2018)

Gambar 2 menunjukkan bahwa tingkat IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat dari tahun ke tahun. IPM meningkat sebanyak 2.92 dari tahun 2012 sebanyak 60.81 menjadi 63.73 pada tahun 2017. Berdasarkan peringkat IPM maka Provinsi Nusa Tenggara Timur tergolong dalam kelompok daerah dengan pembangunan manusia yang menengah (*medium human development*), dimana hal tersebut tergambar dengan nilai IPM yang berkisar antara 0.51 hingga 0.79 (Kuncoro, 2010).

Kedua indikator pembangunan ekonomi baik indikator ekonomi dan indikator social memiliki hubungan timbal balik. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan persediaan sumber daya yang dibutuhkan pembangunan manusia, dengan meningkatnya sumber daya dengan alokasi sumberdaya yang tepat akan mendorong pembangunan manusia menjadi lebih baik (Baety, 2013). Begitupun sebaliknya dengan tingkat pembangunan manusia akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui demokrasi (kuncoro,2010).

Otonomi daerah memberikan penghargaan kepada masing-masing daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerahan kewenangan tersebut diikuti dengan pengalihan masalah pembiayaan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sugiarthi dan Supadmi, 2014).

Otonomi daerah juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan dikarenakan sumber daya alam yang berbeda antardaerah diindonesia, oleh karena itu masih diharapkan adanya campur tangan pemerintah pusat. Mengatasi masalah kesenjangan tersebut peme-

rintah pusat memberikan dana peribangan yang bersumber dari APBN, yaitu terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta

semua daerah berhak menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1. PAD, DAU, dan DAK Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2017

TAHUN	PAD	DAU	DAK
2014	Rp 763.337.478.000	Rp 1.131.687.590.000	Rp 74.235.910.000
2015	Rp 882.315.240.380	Rp 1.300.445.875.000	Rp 100.654.710.000
2016	Rp 995.186.120.950	Rp 1.337.091.848.000	Rp 1.411.352.709.000
2017	Rp 1.061.760.494.720	Rp 1.784.462.326.000	Rp 1.772.353.806.930

Sumber : olah BPS (NTT dalam angka 2014 – 2018)

Tabel 1 menunjukkan bahwa bantuan pemerintah pusat dan pendapatan daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat selama 4 tahun terakhir ini. Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2014 hingga 2017 meningkat sebanyak Rp 289 triliun, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat sebanyak Rp 692triliun, dan untuk Dana Alokasi Khusus (DAU) meningkat sebanyak Rp 1.698 triliun. Peningkatan pendapatan ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Otonomi daerah memberi keleluasan bagi setiap daerah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya namun tidak terlepas juga dari bantuan pemerintah pusat, hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan sumber daya pada tiap daerah. Pembangunan ekonomi di daerah pun di tingkatkan melalui

beberapa indikator yaitu indikator ekonomi dan indikator social.

Provinsi Nusa Tenggara Timur berusaha meningkatkan pembangunan ekonomi melalui kedua indikator tersebut dimana indikator ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi dan indikator social yaitu Indeks pembangunan manusia (IPM). Kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi menurun, sedangkan IPM meningkat dari tahun ke tahun namun tetap berada pada level medium. Ini menjadi tatangan bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan IPM ke level yang lebih tinggi.

Salah satu faktor penentu penting pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah (Sugiarthi dan Supadmi, 2014), dan upaya pemerintah adalah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pendapa-

tan pemerintah daerah bisa berupa pendapatan yang diperoleh oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, serta pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (1996 dalam Mawarni at al, 2013) mengatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan juga bisa bersifat positif jika terjadi kenaikan Output Total Riil, bisa bersifat negative jika terjadi penurunan Output Total Riil, serta bersifat statis jika tidak terjadi perubahan sama sekali (Uhise, 2013). Adanya pertumbuhan ekonomi juga bisa merupakan adanya indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB atas dasar harga

berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu, dan biasa digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan biasa digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (BPS, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output pada suatu waktu tertentu. PDRB menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan lapangan usaha yang merupakan gambaran penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto atas berbagai aktifitas produksi dan pendekatan pengeluaran yang menjelaskan tentang pengeluaran dari nilai tambah tertentu (BPS, 2018).

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dengan rumus:

$$= \frac{PDRB_n - PDRB_{n-1}}{PDRB_{n-1}} * 100\%$$

Dimana:

$PDRB_n$ = nilai PDRB tahun ke n

$PDRB_{n-1}$ = nilai PDRB tahun ke n (tahun sebelumnya)

3.2 Indeks Pembangunan Manusia(IPM)

Pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan – pilihan bagi penduduk, dimana penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia maka harus memperhatikan beberapa hal antara lain produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995 dalam Rustariyuni, 2014).

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR) (BPS, 2018). Kuncoro (2010) mengatakan bahwa peringkat yang disusun oleh IPM berkisar antara 0 (pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan pembangunan yaitu (BPS, 2018):

- 1) Umur Panjang dan Hidup Sehat yang diukur dengan harapan hidup
- 2) Pengetahuan yang diukur dengan harapan lama sekolah (tahun) dan rata-rata lamanya sekolah (tahun)

- 3) Standar Hidup Layak yang diukur dengan pengeluaran riil perkapita

Berdasarkan 3 ukuran pembangunan ini peringkat IPM dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: (1) negara dengan pembangunan manusia rendah bila nilai berkisar 0.0 hingga 0.50; (2) negara dengan pembangunan manusia menengah bila nilai IPM berkisar antara 0.51 hingga 0.79; dan (3) negara dengan pembangunan manusia yang tinggi bila nilai IPM berkisar 0.80 – 1.00. IPM juga mengukur tingkat pembangunan manusia secara relative bukan absolut (Kuncoro, 2010).

BPS (2018) mengemukakan beberapa manfaat dengan adanya perhitungan IPM, antara lain:

- 1) Dapat mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hiduo manusia (masyarakat/penduduk)
- 2) Dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
- 3) Dapat mengukur kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum.

Indeks pembangunan manusia (IPM) dihitung sebagai rata-rata geometric dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran, rumus IPM adalah sebagai berikut:

$$HDI = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Dimana:

$I_{Kesehatan} = Indeks\ Kesehatan$

$I_{pendidikan} = Indeks\ Pendidikan$

$I_{Pengeluaran} = Indeks\ Pengeluaran$

3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2004 pasal 1 angka 18 mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kesek, 2013). Tujuan PAD yang tertuang dalam pasal 3 memberikan kewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Mawarni et al., 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dijadikan sebagai indikator dalam menilai kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerah, hal ini dilihat dari Rasio PAD yang mana jika rasio PADnya tinggi dibandingkan dengan total pendapatan maka suatu daerah akan dikatakan tingkat kemandiriannya tinggi.

Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas (Kesek, 2013):

1) Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepa-

da daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Yustika, 2008)

2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku (Yustika, 2008).

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagian dari keuntungan perusahaan daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah maupun modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

3.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Mawarni at all, 2013), yang bertujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi (Harahap, 2011). Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menetapkan bahwa sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN, sedangkan pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota (uhise, 2013).

DAU yang diberikan kepada suatu daerah ditentukan oleh besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah (Harahap, 2011). Rumus DAU adalah sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Dimana:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

Sidik (2003, dalam Uhise, 2013) mengartikan definisi DAU sebagai berikut:

- 1) Salah satu komponen yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal yang selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
- 2) Instrument untuk mengatasi horizontal *im-balance* yang dialokasikan dengan tujuan peningkatan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.

Equalization grant, yang berfungsi untuk menetralkan ketimpangan kemampuan keuangan daerah.

3.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas public di kabupaten/kota (Harahap, 2011), serta untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN (Sarkoro dan Zulfikar, 2016).

Kebutuhan Khusus yang dimaksud adalah sebagai berikut (Sarkoro dan Zulfikar, 2016):

- 1) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum

dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain.

- 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas utama.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 juga mengatakan bahwa daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menyediakan dana pendamping yang dianggarkan dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK, namun daerah dengan kriteria-kriteria tertentu tidak diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan data panel, gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, yang dalam penelitian ini merupakan 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu, yang dalam penelitian ini adalah data 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 hingga tahun 2017.

Persamaan Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Persamaan 1:

$$\log PE_{it} = \alpha + \log PAD_{it} + \log DAU_{it} + \log DAK_{it} + e_{it}$$

Persamaan 2:

$$\log HDI_{it} = \alpha + \log PAD_{it} + \log DAU_{it} + \log DAK_{it} + e_{it}$$

- a) Variable Independent

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD yang diterima oleh daerah tiap tahunnya (Rupiah)

- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang diukur dengan besarnya target DAU yang diterima oleh daerah tiap tahunnya (Rupiah)

- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang bersumber dari penerimaan APBN dialokasikan untuk membiayai kebutuhan khusus daerah, yang diukur dengan besarnya target DAK yang diterima oleh daerah tiap tahunnya (Rupiah).

- b) Variabel Dependent

- 1) Pertumbuhan ekonomi

Menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam satu tahun tertentu, yang diukur dengan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 (Rupiah).

- 2) Indeks pembangunan manusia(IPM)
Kuantifikasi dari ukuran agregat kualitas manusia dalam pembangunan, yang diukur berdasarkan nilai dari UNDP (bernilai 0 – 100).]

IV. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dimana melihat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pembangunan Ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pengaruh terhadap pembangunan ekonomi ini dilihat dari indika-

tor ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi dan indikator sosial yaitu Indeks pembangunan manusia (IPM).

Berdasarkan pengujian model dalam analisis regresi data panel, model yang terbaik adalah model *Fixed Effect* untuk dianalisis. Model *Fixed Effect* yang dianalisis digunakan untuk melihat pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pembangunan ekonomi baik dari indikator ekonomi maupun dari indikator sosial.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Regresi	Pertumbuhan ekonomi		Indeks pembangunan manusia (IPM)	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	15.03787	0.0000*	7.988465	0.0000*
logPAD	0.089571	0.0000*	-0.154395	0.0000*
logDAU	0.107496	0.0301*	-0.037746	0.6769**
logDAK	0.051503	0.0000*	0.037268	0.0262*
Adjusted R-squared	0.998828		0.725781	
F-statistic	3075.621		10.55120	
Prob. (F-statistic)	0.000000		0.000000	

Sumber: *olah data eviws 8*

Keterangan: *signifikan pada 5%, *tidak signifikan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pembangunan Ekonomi dari indikator ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi)

Dalam pengujian kesesuaian model terlihat bahwa F-statistic signifikan, dapat dilihat dari *p-value* (0.000000) < 0.05. Hal ini berarti bahwa analisis regresi dapat digunakan untuk memprediksikan pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pembangunan Ekonomi dari indikator ekonomi yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

Koefisien determinasipun menunjukkan nilai sebesar 0.998828 yang memiliki arti bahwa 99.88% perubahan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU dan DAK. Sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain diluar model, yaitu sebesar 0.12%.

Persamaan 1:

$$\log PE_{it} = 15.03787 + 0.089571_{it} + 0.107496_{it} + 0.051503_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar **15.03787** dengan lambang positif, yang mana mengandung arti apabila PAD, DAU dan DAK konstan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar **15.03787**.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat dari nilai *p-value* $0.0000 < 5\%$. Meningkatnya 1% Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar **0.089571**. penelitian ini sejalan dengan penelitian Rori *et al* (2016), Dewi (2013), dan Marwani *et al* (2013) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah memegang peranan yang sangat dalam pembangunan ekonomi, dengan peningkatan PAD maka bisa menilai sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD yang semakin besar bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan belanjanya baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dengan peningkatan belanja seperti belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Dengan bantuan yang ada maka pemerintah desa mampu membuat program-program guna peningkatan produksi di desa, seperti program bantuan usaha sehingga mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya 1% Dana Alokasi Umum maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar **0.107496**. pengaruh DAU signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terlihat dari *p-value* $(0.0301) < 5\%$. Sejalan dengan penelitian Mawarni *et al* (2013) berdasarkan pengujian koefisien jalur menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Uhise (2013) menemukan hasil yang sama dimana DAU berpengaruh meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang digunakan untuk membiayai keperluan tertentu daerah, untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penelitian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, dimana dengan meningkatnya 1% DAK akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar **0.051503**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Marhamah (2016) yang menemukan bahwa DAK berdampak meningkatkan pertumbuhan Ekonomi, namun sebaliknya tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswiyanti (2015) yang menemukan bahwa DAK akan berdampak mengurangi Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pembangunan Ekonomi dari indikator sosial (Indeks pembangunan manusia)

Dalam pengujian kesesuaian model terlihat bahwa F-statistic signifikan, dapat dilihat dari $p\text{-value}(0.000000) < 0.05$. Hal ini berarti bahwa analisis regresi dapat digunakan untuk memprediksikan pengaruh PAD, DAU dan

DAK terhadap Pembangunan Ekonomi dari indikator sosial yaitu Indeks pembangunan manusia.

Koefisien determinasi pun menunjukkan nilai sebesar 0.725781 yang memiliki arti bahwa 72.57% perubahan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU dan DAK. Sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain diluar model, yaitu sebesar 27.43%.

Persamaan 2:

$$\log HDI_{it} = 7.988465 - 0.154395_{it} - 0.037746 + 0.037268_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar **7.988465** dengan lambang positif, yang mana mengandung arti apabila PAD, DAU dan DAK konstan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar **7.988465**.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks pembangunan manusia

Hasil analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks pembangunan manusia signifikan namun memiliki pengaruh yang negatif, atau dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan mengurangi tingkat Indeks pembangunan manusia. Signifikan terlihat dari $p\text{-value } 0.0000 < 0.05\%$, dan koefisiennya sebesar -0.154395 yang berarti jika

PAD meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan Indeks pembangunan manusia sebesar 0.154395%. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah harus lebih fokus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun harus juga mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan daerah dan kemampuan daerah sehingga tidak menyebabkan *disinsetif* yang mematikan potensi ekonomi daerah (Sarkoro dan Zulfikar, 2016). Peningkatan PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur berpengaruh mengurangi Indeks pembangunan manusia, hal ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung seperti belanja modal yang dapat berdampak pada pembangunan manusia.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks pembangunan manusia

Hasil analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap *Indeks pembangunan manusia* memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap pada tahun 2011, dimana Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap *Indeks pembangunan manusia*. Hal ini terlihat dari nilai *p-value* yang tidak signifikan yakni sebesar $0.6769 > 5\%$.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah agar mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah. Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah akan memperoleh DAU yang tinggi, dan begitupun sebaliknya jika suatu daerah memiliki potensi fiskal tinggi akan memperoleh DAU yang rendah. Dapat dilihat juga bahwa PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur Meningkat tiap tahunnya, hal ini dapat menggambarkan bahwa tingkat kemandirian yang kuat sehingga ketergantungan terhadap DAU. Tingginya PAD juga belum bisa memastikan bahwa akan mengurangi DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat, hal itu dikarenakan pembagian DAU juga terdiri dari beberapa kriteria antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, angka indeks pembangunan SDM, kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal, sehingga dapat dilihat juga bahwa DAU untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat dari tahun ke tahun.

Hasil analisis regresi yang diperoleh adalah DAU tidak signifikan mempengaruhi *Indeks pembangunan manusia*, walaupun DAU mengalami peningkatan. hal ini diakibatkan Karena DAU yang diberikan oleh pe-

merintah diporsikan lebih besar untuk belanja pegawai sehingga pengaruhnya terhadap *Indeks pembangunan manusia* sedikit atau bahkan tidak sama sekali.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap *Indeks pembangunan manusia*

Hasil analisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap *Indeks pembangunan manusia* memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh sarkoro (2016), dimana Dana Alokasi Khusus berpengaruh meningkatkan terhadap *Indeks pembangunan manusia*. Hal ini terlihat dari nilai *p-value* yang signifikan yakni sebesar $0.0262 < 5\%$. Besarnya koefisien dalam analisis regresi data panel adalah 0.037268, yang berarti dengan meningkatnya 1% Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Provinsi Nusa Tenggara Timur maka akan meningkatkan *Indeks pembangunan manusia* (IPM) sebesar 0.037%.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh wiliantara dan budiasih (2016) dimana ditemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) signifikan dan mengurangi pembangunan manusia, namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh astuti dan astika (2016) serta penelitian yang dilakukan oleh putra dan ulupui (2015) dimana semakin meningkatnya Dana Alokasi Khusus maka akan

semakin meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Menurut UU No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan APBN. Dengan Alokasi Khusus digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, pekerjaan umum, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan dan lingkungan hidup (Williantara dan Budiasih: 2016). Putra dan Ulupai (2015) menggambarkan salah satu pelayanan pendidikan adalah merehabilitasi ruang belajar yang rusak karena dengan menyediakan layanan dan keterjangkauan akses, menyediakan layanan pendidikan bermutu dapat meningkatkan mutu pendidikan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pembangunan daerah untuk dua indikator yaitu indikator ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi) dan indikator sosial (*Indeks pembangunan manusia*), maka hasil yang diperoleh adalah PAD, DAU dan DAK berpo-

tensi untuk mempengaruhi Pembangunan Ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh meningkatkan Pembangunan daerah dari indikator ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi), namun PAD berpengaruh mengurangi Pembangunan Daerah dari indikator sosial (*Indeks pembangunan manusia*). Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi pembangunan daerah, namun hanya berpengaruh meningkatkan pembangunan daerah dari indikator ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi). Dana Alokasi Khusus (DAK) mempengaruhi pembangunan daerah baik dari indikator ekonomi maupun indikator sosial, peningkatan DAK meningkatkan pembangunan daerah. Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis, maka beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan pembangunan daerah antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu meningkatkan PAD agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun dari hasil PAD yang diterima lebih dipastikan agar program-program yang dijalankan lebih tepat sasaran untuk meningkatkan pembangunan manusia.
2. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang berasal dari peme-

rintah pusat bisa lebih dimanfaatkan sesuai kebutuhan agar tepat sasaran.

Hasil penelitian ini belum memberikan penjelasan secara rinci tentang alokasi penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum oleh pemerintah, oleh karena itu perlu dilakukan analisis persektor untuk melihat belanja manakah yang lebih mengkonsumsi sumberdaya keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Ida Ayu Paramitha., Astika, Ida Bagus Putra. 2016. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 17. Nomor 3. 2416 - 2446. ISSN: 2302 – 8556.
- Baety, Nur. 2013. "Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007–2011". Economics Development Analysis Journal 2 (3). ISSN 2252 – 6889.
- BPS. 2014. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka. CV Nario Sari . Jakarta.
- BPS. 2015. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka. CV Nario Sari . Jakarta.
- BPS. 2016. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka. CV Nario Sari . Jakarta.

- BPS. 2017. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka. CV Nario Sari . Jakarata.
- BPS. 2018. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka. CV Nario Sari . Jakarata.
- Dewi, Sakita Laksmi. 2013. “ Pengaruh PAD, PMA dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali”. E-Journal EP Unud. Vol 2 No 11. November. ISSN : 2303-0178.
- Gujarati, Damodar. N dan Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*. Singapore : McGraw Hill.
- Harahap, Riva Ubar. 2011. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatra Utara”. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol 11 No 1. Maret.
- Kesek, Feisly. 2013. “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado”. Jurnal EMBA. Vol 1 No 4. Desember.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. DASAR-DASAR EKONOMIKA PEMBANGUNAN. Edisi 5. UPP STIM YKPN Yogyakarta. ISBN : 979-8170-59-4.
- Mawarni. Darwanis. dan Abdullah, Sukriy. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Di Aceh)”. Jurnal Akuntansi. Vol 2 No 2. Mei.
- Putra, Putu Gde Mahendra,. Ulupui, I gusti Ketut Agung,. 2015. “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 11. Nomor 3. 863 – 877. ISSN: 2302 – 8556.
- Rori, Chindy Febry,. Luntungan, Antonius Y., dan Niode, Audie O. 2016. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001 – 2013”.Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No 02.
- Sarkoro, Hastu. dan Zulfikar. 2016. “Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia 1 (1).
- Siswiyanti, Pungky. 2015. “Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”. Jurnal Akutansi “AKRUAL”. Volume 7. Nomor 1. Hal: 1-17. e-ISSN: 2502 – 6380.
- Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Supadmi, Ni Luh. 2014. “ Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan PERTumbuhan Ekonomi Sebagai Pemo-derasi”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2.
- Todaro. P. Michael dan Smith C. Stephen. 2006: Pembangunan Ekonomi: penerbit erlangga : Jakarta .